

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam konteks bangsa Indonesia, sistem yang dianut adalah demokrasi langsung, di mana rakyat menyalurkan hak kedaulatannya melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil yang akan menjalankan fungsi pemerintahan atas nama mereka. Konsep ini sejalan dengan gagasan Abraham Lincoln, yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum merupakan instrumen penting bagi warga negara dalam menyalurkan hak politiknya untuk menentukan wakil yang akan merepresentasikan kepentingan mereka dalam pemerintahan. Pemilu dilandasi oleh asas kebebasan dan kerahasiaan yang menjamin hak setiap individu dalam proses demokrasi. Dalam pelaksanaannya, integritas demokrasi yang bersih menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Sebagai mekanisme transisi kekuasaan yang sah dan berkala, pemilu menjadi elemen esensial dalam suatu negara demokratis. Tanpa keberadaan pemilu, prinsip-prinsip demokrasi tidak dapat diwujudkan secara substantif.

Pelaksanaan Pemilu yang baik tentu saja akan meningkatkan kualitas demokrasi. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas – asas yang menjadi dasar cita – cita bangsa Indonesia. Asas-asas dalam pemilu mengalami perubahan sepanjang negara Indonesia didirikan, tercatat sebanyak tiga kali perubahan atau penambahan

asas-asas dalam pemilu di Indonesia. Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 diselenggarakan dengan berlandaskan pada asas kejujuran, kebersamaan, serta asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, pada masa Orde Baru yang dimulai sejak Pemilu tahun 1971, asas kejujuran dan kebersamaan ditiadakan, sehingga yang diterapkan hanya asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber). Setelah tumbang rezim Orde Baru dan memasuki era reformasi, asas pemilu kembali mengalami perubahan, yakni dengan menggabungkan asas Jujur dan Adil (Jurdil) ke dalam asas Luber, sehingga membentuk asas Luber-Jurdil yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu di era demokrasi modern (Fatayati, 2017).

Pemilu yang bersih adalah pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan, serta menjamin hak-hak politik setiap warga negara. Istilah "bersih" di sini berarti tidak ada praktik manipulatif yang mencederai prinsip demokrasi. Pemilu bukan sekadar mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga mencerminkan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik.

Partisipasi politik merupakan ciri utama pemilu, di mana warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al., (2025) menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap proses politik, calon pemimpin, dan konsekuensi dari pilihan politik yang diambil. Partisipasi politik masyarakat berperan penting dalam menentukan pemimpin serta arah kebijakan pemerintah. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi melalui

pendidikan politik dan kebijakan yang mendukung (Hutajulu et., al 2024). Tingginya partisipasi juga mencerminkan keberhasilan penerapan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pemilu yang demokratis memungkinkan rakyat memilih tanpa hambatan. Untuk mendukung partisipasi yang berkualitas, diperlukan pendidikan politik agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara (Sani dan Pinem, 2023). Pemilih tidak cukup hanya hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga perlu memahami pilihan mereka, alasan memilih, serta konsekuensi dari pilihan tersebut bagi masa depan daerahnya.

Pemilih yang bijak tidak hanya sekedar memilih, akan tetapi mengetahui, mempertimbangkan dan menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak lain. Paksaan dan pengaruh dalam hal ini dapat dikatakan sebagai mobilisasi politik yaitu berperilaku politik berdasarkan paksaan dari pihak lain bukan berdasarkan inisiatif dan kemauan dari diri sendiri contohnya politik uang dan tindakan curang lainnya. Mobilisasi politik ini dilakukan oleh elite politik untuk mengorganisasi partisipasi politik masyarakat guna memperoleh kekuasaan.

Dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perilaku pemilih tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi penting yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk pemahaman individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas partisipasi politik (Ramadhani et al., 2023). Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam membentuk perilaku pemilih yang berkualitas.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merujuk pada pemahaman dasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Secara umum, pengetahuan ini mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, struktur dan sistem politik serta pemerintahan, nilai-nilai universal yang mendasari kehidupan dalam masyarakat demokratis, prinsip-prinsip kerja sama demi tercapainya kesejahteraan bersama, serta kemampuan untuk hidup secara harmonis dalam tatanan masyarakat global.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan kemampuan yang tumbuh dari pengetahuan kewarganegaraan, sehingga pengetahuan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diaplikasikan secara nyata dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup dua aspek utama, yaitu keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipatif (*participation skills*), yang keduanya berperan penting dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) merujuk pada seperangkat sikap dan nilai yang seyogianya dimiliki oleh setiap warga negara guna menunjang partisipasi politik yang efektif, mendukung berjalannya sistem politik yang sehat, serta mendorong terwujudnya martabat, harga diri, dan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sunarso dkk., 2016).

Civic competence yang meliputi *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* berperan penting dalam membentuk perilaku pemilih yang bijak dan bertanggung jawab. Warga negara yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem politik dan hak-hak sebagai warga negara (*civic knowledge*),

memiliki kecakapan dalam mengevaluasi informasi serta berpartisipasi secara aktif (*civic skills*), dan menunjukkan sikap kewarganegaraan yang dilandasi nilai-nilai demokrasi seperti integritas, toleransi, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama (*civic dispositions*), cenderung mengambil keputusan politik secara rasional dan etis.

Dengan demikian, kompetensi *civic* menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perilaku pemilih yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Kesimpulannya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik warga negara. Melalui PKn, individu tidak hanya diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu kembali digelar serentak di Indonesia pada tahun 2024. Pemilihan presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kemudian disusul dengan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 yang mencakup pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Dairani, 2023).

Mengkaji mengenai pemilu, salah satu jenis pemilu yang paling dekat dengan aktivitas keseharian warga adalah pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan jalannya pembangunan lokal. Oleh sebab itu, kesuksesan pilkada sangat bergantung pada perilaku pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pemilih

dituntut tidak hanya sekedar hadir di TPS, namun juga memahami siapa yang dipilih, mengapa memilih, dan apa dampaknya bagi masa depan daerah.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi penting yang memiliki dampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan daerah. Proses ini tidak hanya menentukan pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengambil keputusan strategis, tetapi juga mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi. Pilkada menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana peralihan kekuasaan secara damai di tingkat daerah, tetapi juga menjadi indikator partisipasi politik, kualitas pendidikan politik warga, serta efektivitas pemerintahan daerah.

Pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak termasuk di Kelurahan Kualo Silo Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Pilkada diselenggarakan dalam rangka memilih calon walikota dan wakil walikota Tanjung Balai Periode 2025- 2030. Sebanyak tiga paslon yang ditetapkan oleh KPU Kota Tanjung Balai yaitu, paslon nomor urut satu Mahyaruddin Salim dan Muhammad Fadly Abdina, paslon nomor urut dua H. Waris Tholib dan Rolel Harahap (petahana), paslon nomor urut tiga Eka Hadi Sucipto dan Darwin. Paslon nomor urut satu memperoleh suara terbanyak dan sah sebagai walikota dan wakil walikota Tanjung Balai periode 2025 – 2030.

Dalam konteks Pilkada Tanjung Balai Tahun 2024, partisipasi pemilih terkhusus di Kelurahan Kualo Silo Bestari belum menunjukkan angka maksimal. Berdasarkan data dari KPU Kota Tanjung Balai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

pada Pilkada Tahun 2024 di Kelurahan Kualo Silo Bestari tercatat sebanyak 1914 orang. Namun, jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS hanya sebanyak 1394 orang. Artinya, terdapat 520 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal.

Rendahnya angka partisipasi menjadi persoalan penting yang perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat ialah rendahnya pengetahuan politik atau pendidikan politik. Padahal dengan adanya pendidikan politik dan pemahaman masyarakat mengenai politik menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi, sebab warga yang kritis mampu mengevaluasi kebijakan dan tindakan elite politik secara rasional dan objektif (Mukmin dan Sihaloho, 2024).

Penelitian Yasmin dan Ndona (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman politik seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk terlibat aktif dalam pemilu. Literasi politik berperan dalam membentuk kesadaran serta memengaruhi preferensi politik individu. Pemahaman masyarakat terhadap konsep hak dan kewajiban warga negara belum sepenuhnya seimbang.

Kecenderungan menuntut hak tanpa kesadaran menjalankan kewajiban masih sering ditemui dalam praktik kehidupan berbangsa. Ketimpangan ini dapat memicu persoalan dalam kehidupan sosial-politik, seperti rendahnya tingkat partisipasi politik dan lemahnya penyelenggara negara (Esra et al., 2022). Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah baik karena kekecewaan terhadap kinerja maupun janji-janji politik yang tidak terpenuhi, menjadi salah satu

faktor utama yang menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum (Nainggolan & Ivanna, 2023).

Dari ketiga paslon, paslon nomor urut 2 merupakan petahana. Meskipun secara keseluruhan paslon nomor urut dua (petahana) tidak memperoleh kemenangan ditingkat kota namun di Kelurahan Kualo Silo Bestari, petahana justru meraih dukungan suara terbanyak. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kecenderungan perilaku pemilih yang spesifik dan tidak seragam secara wilayah. Dengan demikian, penting untuk menelusuri lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat di kelurahan Kualo Silo Bestari dalam menentukan pilihan politiknya.

Dengan mempertimbangkan fakta tersebut maka penting untuk dikaji mengenai perilaku pemilih masyarakat di Kelurahan Kualo Silo Bestari pada pemilihan Walikota Tanjung Balai tahun 2024.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku pemilih masyarakat pada pemilihan walikota Tanjung Balai tahun 2024 di Kelurahan Kualo Silo Bestari dengan menggunakan pendekatan perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti yaitu pendekatan sosiologis, psikologi sosial dan pilihan rasional. Pendekatan perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suara masyarakat di Kelurahan Kualo Silo Bestari dalam menentukan pilihan politiknya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut agar penelitian

menjadi lebih terarah dan lebih mendalam penelitiannya. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Kualo Silo Bestari belum maksimal sebagaimana terlihat dari selisih antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah pemilih yang hadir di TPS pada Pilkada Kota Tanjung Balai Tahun 2024.
2. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dapat menjadi indikasi lemahnya kompetensi kewarganegaraan *civic competence*, *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* masyarakat.
3. Tingginya angka golput (tidak hadir di TPS) mengindikasikan lemahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
4. Kondisi sosial dan geografis masyarakat yang heterogen di Kelurahan Kualo Silo Bestari, diduga juga memengaruhi pola perilaku pemilih.
5. Kurangnya Minat Pemilih untuk Datang ke TPS.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap terarah dan fokus, batasan penelitian ini ditetapkan hanya pada perilaku pemilih di Kelurahan Kualo Silo Bestari dalam konteks Pemilihan Walikota Tanjung Balai tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku pemilih masyarakat setempat yang dikaji menggunakan pendekatan perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti yaitu ada tiga pendekatan, pendekatan sosiologis, psikologi sosial dan pilihan rasional.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih masyarakat berdasarkan pendekatan perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Tanjung Balai tahun 2024 di Kelurahan Kualo Silo Bestari.
2. Untuk mengetahui bentuk dan karakteristik perilaku pemilih di Kelurahan Kualo Silo Bestari pada pemilihan Walikota Tanjung Balai tahun 2024.
3. Untuk mengetahui kecenderungan perilaku pemilih masyarakat dalam pemilihan Walikota Tanjung Balai Tahun 2024 berdasarkan tiga pendekatan perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti, yaitu pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis Penelitian ini ialah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan memperkaya kajian tentang perilaku pemilih dalam konteks demokrasi lokal sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Melalui studi ini, pemahaman mengenai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi Pancasila, seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, dapat diperdalam secara empiris dan dihubungkan dengan teori kewarganegaraan aktif serta *civic engagement* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar kontekstual dalam pembelajaran PPKn, khususnya untuk memperkuat kesadaran siswa dan masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang beretika dan bertanggung jawab. Temuan dari studi kasus ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan (atau diabaikan) dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga mendukung pendidikan politik yang membangun karakter warga negara yang kritis dan berintegritas.

